



KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

Nomor: 24.a/LHE-Ev/Insp-Bkt/2024

Tanggal: 5 Agustus 2024



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi
Telp.(0752) 6218282 Fax (0752) 6218283
Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

Bukittinggi, 5 Agustus 2024

Nomor : 24.1 /LHE-Ev/Insp-Bkt/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP
SKPD

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota
Bukittinggi
di -
BUKITTINGGI

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan di tingkat SKPD dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD meliputi penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP SKPD menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
- b. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- c. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- d. Pemantauan rencana aksi telah dilakukan dalam rangka pengendalian kinerja.
- e. Pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- f. Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- g. Informasi mengenai kinerja telah ditingkatkan untuk pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi menunjukkan nilai sebesar 74,90 dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, dengan interpretasi implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun ini jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,05 yaitu dari nilai 74,85 pada tahun 2023 menjadi 74,90 pada tahun 2024. Tingkat akuntabilitas kinerja tidak mengalami peningkatan/penurunan predikat, masih dengan predikat yang sama dengan tahun sebelumnya.

SPH

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Th. 2023	Th. 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,40	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,95	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,85	74,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Ketersediaan dokumen perencanaan diantaranya dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dengan tujuan dan sasaran yang jelas, Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART serta menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis; dan
- Telah memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu:

- Pedoman teknis penyusunan perencanaan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan belum disusun dan diformalkan.

2) **Pengukuran Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses pencapaian kinerja.
- Sudah terdapat definisi operasional yang jelas dalam IKU dan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja.

SA
8

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala pertriwulan namun pemantauan atas pengukuran capaian kinerja masih dilaksanakan per semester, belum dilaksanakan pertriwulan.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ditindaklanjuti;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bapelitbangda Kota Bukittinggi secara tertulis dalam hal penyusunan pedoman teknis perencanaan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- 2) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala pertriwulan melalui rapat evaluasi/monev;
- 3) Melakukan perbandingan realisasi kinerja dalam laporan kinerja dengan realisasi kinerja ditingkat nasional;
- 4) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2023.

SP
4

Demikian hasil evaluasi AKIP ini disampaikan sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan SKPD Saudara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI,

ELVINA KARTIKA ESYA, S.E. Akt, M.M. CFrA. CRMO. CA.
Pembina Tk.I-NIP.198103252005012008

Tembusan :

1. *Yth. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)*
2. *Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota (sebagai laporan).*

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITINGGI TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		22,5			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	B	4,2			91,67%
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Terdapat pedoman berupa surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD T.A. 2019 dan Surat Sekretaris Daerah perihal Penyusunan RKUA dan RPPAS T.A. 2023 seperti Surat Edaran Setda Nomor: 000.7.2/93/ Bappelitbangda/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024	Peraturan/keputusan/surat edaran kepala daerah ttg pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan	0,5
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Terdapat RPJPD Kota yang disahkan dengan Perda No.8 tahun 2026 tentang Rencana jangka Panjang Perangkat Daerah tahun 2006 s/d 2025	RPJPD Kota Bukittinggi	1
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Terdapat Renstra yang disahkan dengan Perwako Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD yang disahkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan IKU DP3APPKB sesuai SK Walikota Nomor: 188.45/27/DP3APPKB/II-2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Tahun 2021-2026	RPJMD, Renstra dan IKU SKPD	1
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Terdapat Renja SKPD sesuai Perwako Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kepala DP3APPKB	Renja SKPD dan PK Kepala SKPD Tahun 2023	1
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Terdapat dokumen Perjanjian Kinerja, renja, dan rencana aksi triwulanan	Rencana Aksi Tahun 2023 dan 2024	1
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Terdapat RKA dan DPA DP3APPKB Tahun 2024	DPA Tahun 2024	1
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3			97,73%
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen perencanaan kinerja Bapelitbangda yang telah diformalkan Sbb: 1. Perwako No.32 Tahun 2021 ttg Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 2. Perwako No. 25 Tahun 2023 ttg Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 3. IKU Kepala DP3APPKB di tetapkan dengan SK Nomor 188.45/27/DP3APPKB / 34 /II-2022 tgl. 21 Februari 2022 4. PK Tahun 2023 dan 2024 Sudah ditandatangani namun belum distempel 5. Rencana Aksi DP3APPKB Tahun 2024	Renstra, IKU, Renja, PK Kepala SKPD dan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disahkan.	0,75
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan.				Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada website Bukittinggi kota dan melalui aplikasi serta website lainnya	Screenshot laman web publikasi Renstra, IKU, Renja, PK Kepala SKPD dan Rencana Aksi Tahun 2023	1
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai tergambar pada isu strategis pada Bab II dan Bab III Renstra DP3APPKB	Renstra	1
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Tergambar pada Bab IV Renstra DP3APPKB yang mengacu pada IKU Kota Bukittinggi	IKU (tujuan dan sasaran)/Renstra Bab IV	1
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dimana IKU DP3APPKB ada 3 yakni: 1) Indeks Kualitas Keluarga, 2) Indeks Pemenuhan Hak Anak, 3) Capaian Kota Layak Anak, 4) Total Fertility Rate, dan 5) Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar telah spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan mempunyai tenggat waktu yang jelas	IKU (tujuan dan sasaran)/Renstra Bab IV	1

Handwritten signature/initials

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis				Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan semenjak awal periode perencanaan jangka menengah tahun 2021	IKU dan perubahannya	1
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dimana Kota Bukittinggi dimana target indikator kinerja tahun 2023 DP3APPKB semua capaian secara rata-rata sudah diatas seratus persen dari target	PK Kepala SKPD	1
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dibuktikan dengan adanya Cascading	Cascading dan PK	1
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				DP3APPKB memiliki sinergitas, keterkaitan atau cosscuting dengan SKPD lain pada jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu dengan Disdikbud, Dinkes, Dispora, Disperkim, DPTMPTSP dan Diskop UKM	Pohon kinerja	1
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				DP3APPKB telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Tahun 2023	PK pejabat struktural	1
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Setiap pegawai pada DP3APPKB telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang telah dirumuskan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	SKP seluruh pegawai tahun 2023	1
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12			100,00%
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				Anggaran yang ditetapkan dalam DPA DP3APPKB Tahun 2023 telah mendukung pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	DPA Tahun 2023	1
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Aktivitas yang ada dalam rencana aksi telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Rencana Aksi	1
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on tahune right track.				DP3APPKB telah melakukan monitoring terkait capaian target kinerja	Laporan movev rencana aksi triwulan tahun 2024	1
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				DP3APPKB telah melakukan monitoring pencapaian kinerja dibuktikan dengan Laporan Monitoring Evaluasi	Laporan movev rencana aksi triwulan tahun 2024	1
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				DP3APPKB telah melaksanakan tindak lanjut (AoI) terkait LHE SAKIP dan tidak ada perubahan renstra.	Perubahan dokumen perencanaan atau notulen rapat pembahasan perubahan dokumen perencanaan.	1
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				DP3APPKB telah melaksanakan tindak lanjut (AoI) terkait LHE SAKIP dan tidak ada perubahan renstra.	Perubahan dokumen perencanaan atau notulen rapat pembahasan perubahan dokumen perencanaan.	1
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Setiap eselon pada DP3APPKB telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kinerja pejabat eselon dan adanya dialog kinerja	PK pejabat struktural	1
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan setiap pegawai telah membuat Sasaran Kerja pegawai (SKP) dan adanya dialog kinerja	SKP pegawai	1
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,6			
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8			100,00%
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				Sudah terdapat SK Nomor 188.45-19-2023 tentang pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan telah ada Standar Operasional Prosedur Nomor 188.45-19-2023 tentang Tim Penyusunan Data Kinerja DP3APPKB Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023	SK kepala SKPD tentang pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	1
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Terdapat pada Renstra DP3APPKB halaman 2 Bab IV dan SK Walikota Nomor: 188.45/27/DP3APPKB/II-2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Tahun 2021-2026	IKU	1

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				Terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yaitu Standar Operasional Prosedur Nomor 476/735/DP3APPKB/XII-19 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3APPKB Kota Bukittinggi	SOP pengukuran kinerja/SOP pengumpulan data kinerja	1
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,3			89,29%
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				Kepala DP3APPKB sudah terlibat dalam pengambilan keputusan melalui rapat dibuktikan dengan laporan dan notulen hasil monitoring realisasi kinerja	Notulen hasil monitoring pencapaian kinerja realisasi rencana aksi	1
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan sumber data yang diperoleh dari masing-masing Bidang di DP3APPKB	IKU atau LKjIP yang memuat sumber data	1
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dengan mengukur indikator kinerja dalam IKU dan PK. Sumber data pengukuran kinerja telah sesuai dengan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU atau LKjIP yang memuat sumber data	1
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala per triwulan melalui laporan monev rencana aksi Triwulan I Tahun 2024	Laporan monev rencana aksi triwulan tahun 2024	1
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya. Dibuktikan dengan dilakukan rapat monev evaluasi kinerja semester I 2024, Semester I dan II 2023	Notulen rapat monev rencana aksi/penilaian SKP	0,75
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi, hanya menggunakan lembar kerja sederhana berupa excel dan pengumpulan data kinerja individu memakai e-kinerja	Screechhoot aplikasi E Kinerja dan aplikasi pengumpulan data kinerja SKPD	0,75
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengukuran capaian kinerja hanya menggunakan lembar kerja sederhana berupa excel dan pengukuran capaian kinerja individu menggunakan e-kinerja	Screechhoot aplikasi E Kinerja pengukuran kinerja SKPD	0,75
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5			97,50%
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				Telah ada penyesuaian tunjangan kinerja terhadap pengukuran kinerja pegawai dengan pengurangan TPP bagi pegawai yang penilaian kinerja kurang dari 100	Perwako TPP/screenshot aplikasi TPP	1
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				Terdapat evaluasi kinerja ASN Pemerintah Kota Bukittinggi oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	Dokumen Hasil evaluasi SKP (dari BKPSDM) dan rekap mutasi jabatan struktural dan fungsional.	0,75
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				Terdapat evaluasi kelembagaan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan dan keputusan Anjab ABK SKPD (SK Walikota)	1
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				Pada DP3APPKB tidak ada perubahan Renstra	Laporan monev triwulan rencana aksi dan perubahan dokumen perencanaan jika ada (perubahan renja)	1
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				Pada DP3APPKB tidak ada perubahan Renstra	Perubahan dokumen perencanaan jika ada (perubahan renstra dan DPA)	1
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				Telah ada pengukuran kinerja triwulan dibuktikan dengan Laporan Monev triwulan tahun 2024	Laporan monev rencana aksi triwulan dan Perubahan rencana aksi	1
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Telah ada pengukuran kinerja triwulan dibuktikan dengan Laporan Monev triwulan tahun 2023, namun belum menggambarkan perubahan anggaran pada laporan tersebut. Akan tetapi telah ada Perubahan Anggaran pada tahun 2023.	Laporan monev triwulan dan DPA Perubahan	1

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Terdapat uraian efisiensi anggaran pada LKjIP DP3APPKB Tahun 2023 Bab III	Lap efisiensi penggunaan anggaran (Bab III LKjIP)	1
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				DP3APPKB telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja melalui wawancara dengan pejabat struktural	Hasil wawancara atas pemahaman dan kepedulian atas pengukuran kinerja pada pejabat struktural.	1
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja sesuai dengan hasil wawancara/konfirmasi dengan pegawai	Hasil wawancara atas pemahaman dan kepedulian atas pengukuran kinerja pada seluruh pegawai.	1
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,55			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,4			100,00%
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Telah ada laporan kinerja yaitu LKjIP DP3APPKB Kota Bukittinggi tahun 2023	LKjIP	1
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Telah ada laporan kinerja yang ada tahunan dan triwulanan yaitu LKjIP tahun 2023 dan Laporan monev triwulan	laporan monev rencana aksi triwulanan	1
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				LKjIP DP3APPKB telah diformalkan oleh Kepala DP3APPKB Kota Bukittinggi	LKjIP yang telah ditandatangani dan distempel	1
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				Telah ada reviu LKjIP tingkat SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi	Surat Pernyataan telah direviu LKjIP	1
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				LKjIP telah di Upload pada situs PPID atau website Kota Bukittinggi	Screenshot publikasi LKjIP pd website Kota/AKPD/PPID	1
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				LKjIP DP3APPKB telah di upload tepat waktu pada esr.menpan.go.id yaitu tanggal 20 Maret 2024	Screenshoot ESR Menpan per 31 maret	1
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15			97,22%
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				LKjIP yang disusun oleh DP3APPKB telah berkualitas sesuai dengan standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				LKjIP yang disusun oleh DP3APPKB telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja DP3APPKB, tergambar pada BAB III LKjIP	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				LKjIP yang disusun oleh DP3APPKB telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan DP3APPKB, tergambar pada BAB III LKjIP	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				LKjIP yang disusun oleh DP3APPKB telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tergambar pada BAB III LKjIP	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				LKjIP yang disusun oleh DP3APPKB telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, tergambar pada BAB III LKjIP	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	0,75
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, tergambar pada BAB III	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, tergambar pada BAB III	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), tergambar pada BAB III	LKjIP dan Hasil reviu LKjIP	1

APK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6			100,00%
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Telah ada perhatian pimpinan terkait informasi laporan kinerja berupa LKJIP dan rapat-rapat evaluasi kinerja yang dibuktikan dengan notulen rapat pembahasan laporan realisasi kinerja	Notulen rapat pembahasan laporan kinerja/dialog kinerja/dok. rakor lap kinerja	1
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Telah ada kepedulian seluruh pegawai terkait informasi laporan kinerja berupa SKP dan rapat-rapat evaluasi kinerja.	PK/SKP/IK/notulen rapat atau dok pembahasan laporan kinerja/dialog kinerja	1
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dibuktikan dengan adanya laporan monev dan rekomendasi ke depan di LKJIP	LKJIP Bab 3 atau 4 dan hasil revidi LKJIP	1
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran, dibuktikan dengan laporan monev triwulanan Tahun 2023 dan notulen rapat pembahasan/realokasi anggaran	LKJIP Bab 3 atau 4 dan hasil revidi LKJIP	1
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja termuat dalam LKJIP bab III terkait keberhasilan/kegagalan.	LKJIP Bab 3 atau 4 dan hasil revidi LKJIP	1
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Informasi dalam LKJIP tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yaitu pada renja 2023	LKJIP Bab 3 atau 4 dan hasil revidi LKJIP	1
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi tergambar dalam LKJIP Bab III dan BAB IV	LKJIP	1
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,25			
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4			100,00%
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa SK Inspektur Daerah Kota Bukittinggi Nomor 188.45/700.16/Insp-Bkt/2023 tanggal 12 Juli 2023	SK pedoman evaluasi saki	1
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	LHE saki DP3APPKB No. 8e/LHE-Ev/Insp-Bkt/2023 tgl. 28 Desember 2023	1
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yakni evaluasi SAKIP pada SKPD dan Revidi LKJIP tingkat Pemerintah Daerah	LHE DP3APPKB No. 8e/LHE-Ev/Insp-Bkt/2023 tgl. 28 Desember 2023, LHR LKJIP No.52/LHR/Insp-Bkt/2023 tgl.25 April 2024	1
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25			90,00%
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar yaitu mengacu kepada standar kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi	Pedoman evaluasi AKIP dan LHE AKIP SKPD/PKE AKIP	1
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti webinar evaluasi SAKIP yang diselenggarakan oleh lembaga Smart ID	Rekap data tim evaluator AKIP (ket pelatihan/sertifikat terkait SAKIP)	1
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, menjadi hasil evaluasi pada LHE SAKIP dari Kemendagri RB.	LHE AKIP SKPD/perbandingan dg LHE AKIP dari Kemendagri	0,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	LHE AKIP SKPD	1
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) berupa pengolahan dengan Aplikasi Microsoft Excel belum berupa Aplikasi E-SAKIP	Screenshot aplikasi utk evaluasi atau e-Saki (bila ada)	0,75

SPK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DP3APPKB		Catatan Kondisi yang Ada di SKPD	Daftar Evidence seharusnya	Perhitungan Penilaian
			Jawaban	Nilai			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10			100,00%
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				Sekaitan dengan rekomendasi pada LHE SAKIP sebelumnya, DP3APPKB telah melakukan tindak lanjut berupa: 1. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. 2. Pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi Informasi 3. Telah adanya penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Laporan tindak lanjut LHE AKIP dan matriks tindak lanjut/progres)	1
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	Butir rekomendasi pada LHE AKIP SKPD dan tindak lanjutnya	1
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	LHE AKIP tahun 2022 dan 2023	1
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	LHE AKIP yg menunjukkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan daftar sub kegiatan yg difocusing	1
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				Sudah terdapat perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi peningkatan kinerja internal dengan data sebagai berikut: a. capaian indikator 'indeks kualitas keluarga' tahun 2022 realisasi sebesar 113,06% dan pada tahun 2023 sebesar 121,58% terjadi peningkatan sebesar 08,52% b. capaian indikator 'indeks pemenuhan hak anak' tahun 2022 realisasi sebesar 103,24% dan pada tahun 2023 sebesar 107,37% terjadi peningkatan sebesar 04,13% c. capaian indikator 'tingkat capaian kota layak anak' tahun 2022 realisasi sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 133,33% terjadi peningkatan sebesar 33,33%	Lap capaian kinerja/LKIP tahun 2022 dan 2023	1
					d. capaian indikator 'total fertility rate' tahun 2022 realisasi sebesar 103,75% dan pada tahun 2023 sebesar 140,27% terjadi peningkatan sebesar 36,52% e. capaian indikator 'persentase keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar' tahun 2022 realisasi sebesar 136,19% dan pada tahun 2023 sebesar 107,58% terjadi penurunan sebesar 28,61%		
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	100	BB	74,9			

2/8/24